

Framing Pemberitaan *LKBN Antara* Mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Aprilia Alfina Damayanti^{1)*}, Erwin Kartinawati²⁾, Hasbullah Azis³⁾

^{1,2,3)} Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial, Humaniora, dan Seni, Universitas Sahid Surakarta,
Indonesia

Email: aprilialfina@gmail.com^{1)*}

erwin.kartinawati@usahidsolo.ac.id²⁾

hasbullah.azis@usahidsolo.ac.id³⁾

Received: April 8, 2026 | Accepted: April 23, 2026 | Published: July 24, 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing atau pembedakan berita *Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) Antara* tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG merupakan program andalan pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana yang dijanjikan pada kampanye Pilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 lalu. Framing *LKBN Antara* menarik untuk diteliti karena posisinya dibawah naungan BUMN sesuai UU No 19 tahun 2003 pasal 4 ayat 2-3. Program MBG sendiri banyak mendapatkan sorotan, tidak hanya di dalam negeri namun juga media asing sehubungan banyaknya kasus keracunan maupun polemik lain terkait pelaksanaannya. Untuk mengetahui framing *LKBN Antara* mengenai program MBG, peneliti menggunakan model analisis Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan suggest remedies*. Unit analisis berupa berita yang dipublikasikan di *LKBN Antara* melalui penelusuran kata kunci “MBG” dan didapat sebanyak 548 berita. Jumlah berita dianalisis tidak seluruh namun diambil 10 persen sampel dengan metode random, atau sebanyak 55 berita. Hasil penelitian menunjukkan *LKBN Antara* dalam membingkai program MBG, menempatkan pemerintah sebagai aktor utama. Hal itu dapat dilihat dari pemilihan judul, isi berita, dan narasumber. Posisi *LKBN Antara* sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditambah jejak historis pers di masa lalu terkait kontrol pemerintah terhadap pers, membentuk kecenderungan pemberitaan yang berhati-hati dan lebih selaras dengan narasi resmi pemerintah.

Kata kunci: framing, MBG, *LKBN Antara*

Abstract

This study aims to examine the news framing of the State News Agency (LKBN) Antara on the Free Nutritious Meals (MBG) program. MBG is a flagship program of the Indonesian government, led by Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka, as promised during the 2024 presidential election campaign. The framing of LKBN Antara merits scholarly investigation due to its institutional standing as a State-Owned Enterprise (BUMN), as stipulated in Law No. 19 of 2003, Article 4, Paragraphs 2–3. The MBG program itself has received a lot of attention, not only domestically but also in foreign media, due to the many cases of poisoning and other controversies related to its implementation. To determine LKBN Antara's framing of the MBG program, the researcher used Robert N. Entman's analysis model, which covers four main elements, namely defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, and suggesting remedies. The unit of analysis consisted of news articles published by LKBN Antara using the keyword “MBG,” which yielded 548 articles.

46 *Corresponding author.

E-mail: aprilialfina@gmail.com

Not all articles were analyzed; instead, a random sample of 10 percent (55 articles) was selected. The results of the study show that LKBN Antara, in framing the MBG program, placed the government as the main actor. That could be seen from the choice of headlines, news content, and sources. LKBN Antara's status as a state-owned enterprise, coupled with the press's historical record of government control, has shaped a tendency toward cautious news reporting more in line with the government's official narrative.

Keywords: framing, MBG, LKBN Antara

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memenangkan Pemilu 2024. Program tersebut semula bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, remaja, dan kelompok rentan sebagai upaya menurunkan angka stunting dan malnutrisi tersebut menimbulkan polemik karena dianggap tidak efektif di samping menyedot banyak anggaran termasuk dari sektor lain. Program tersebut dilaporkan mengambil anggaran dari sektor lain dari anggaran pendidikan Rp 223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen) (Idris, 2025). Sorotan mengenai program MBG munculnya banyak kasus keracunan. Jumlah kasus keracunan hingga akhir September 2025 disebut lebih dari 6.000 orang, yang tidak hanya terjadi di pulau Jawa namun juga beberapa pulau lainnya (Widyastuti&Wulandari, 2025). Berita mengenai isu MBG tersebut tidak hanya diberitakan media Indonesia, sejumlah media asing juga turut menyoroti kasus MBG antara lain *The*

Star Malaysia, *Reuters*, *NDTV*, *Telegraph Inggris*, dan *Vietnam Plus* (Com dll., 2025; Syakura, 2025).

Isu tersebut menarik untuk dikaji karena memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi. Dalam hal ini utamanya adalah nilai penting atau dampaknya terhadap hajat hidup orang banyak, kebaruan, dan besar. Di Indonesia, semua media massa memberitakan tak terkecuali Kantor Berita *Antara* yang merupakan media pemerintah yang dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan kepemilikannya *LKBN Antara* sepenuhnya berada di tangan negara dan modal awalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, *LKBN Antara* dapat dipahami sebagai media milik negara dalam arti dibiayai dan dimodali oleh negara, meskipun dalam operasionalnya tetap dikelola berdasarkan prinsip korporasi sebagaimana karakteristik Perusahaan Umum (Perum). Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 4 ayat (2) – (3) (UU RI NO 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 2003).

Penelitian ini secara spesifik bertujuan mengkaji bagaimana *LKBN Antara* dalam memberitakan program MBG. *LKBN Antara* dipilih karena media berita yang sumber pembiayaan awal dari APBN berkaitan dengan aspek kepemilikan dan permodalan. Sebagai media milik negara, *LKBN Antara* memiliki tanggung jawab ganda: secara kelembagaan bertanggung jawab kepada negara sebagai pemilik modal, dan secara profesi jurnalistik bertanggung jawab kepada publik untuk menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan tidak berpihak.

Penelitian ini menggunakan teori framing media dan agenda setting. *Framing* media sendiri dipilih karena melihat bagaimana media menempatkan informasi dalam konteks tertentu, sehingga isu tersebut mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan isu lainnya (Eriyanto, 2002). *Framing* yang artinya “*frame*” (membingkai) sebuah foto hanya bagian yang berada dalam bingkai yang diambil. Akibatnya, hanya beberapa aspek yang berarti, lebih diperhatikan, dianggap krusial, dan lebih melekat dalam benak masyarakat (Eriyanto, 2002). Sedangkan, teori agenda setting merupakan media massa yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara pandangan serta tindakan masyarakat dengan menentukan agenda berkaitan isu yang dianggap penting (Sutedjo, 2001). Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui konstruksi berita. Media menentukan isu mana yang dianggap penting, lalu menyoroti aspek tertentu dari isu tersebut sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami dan meresponsnya (Eriyanto, 2002a). Proses ini berlangsung melalui pemilihan isu dan pembingkai (framing), di mana agenda media dapat berkembang menjadi agenda publik. Pada akhirnya, agenda publik tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat masyarakat maupun dalam ranah kebijakan politik (*policy agenda*) (Littlejohn & Foss, 2011).

Sejalan dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana media publik dalam memberitakan program MBG terhadap masyarakat dengan menggunakan

analisis *framing* model Robert N Entman. Model ini dipilih karena mampu mengidentifikasi cara media menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa sekaligus mengabaikan aspek lainnya, misalnya melalui penempatan berita (di headline depan atau bagian belakang), penggunaan label, atau pengulangan informasi (Eriyanto, 2002). Analisis framing Robert N Entman menggunakan empat elemen yaitu pendefinisian masalah (*Define Problems*), penyebab masalah (*Diagnose Causes*), penilaian moral (*Make Moral Judgement*), hingga saran penyelesaian (*Suggest Remedies*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana *LKBN Antara* membingkai pemberitaan program MBG di tengah kedekatan struktural dengan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-kualitatif. Menurut (Moleong, 2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dan mendalam melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode studi kasus dilakukan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian, yaitu *LKBN Antara* dan satu isu yang spesifik, yaitu pemberitaan mengenai MBG.

Penelitian dilakukan melalui studi dokumen, bukan studi lapangan. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara daring dengan memanfaatkan portal berita resmi *LKBN Antara* (www.antaranews.com)

sebagai sumber utama data berupa berita terkait program MBG. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari berita yang dipublikasikan di situs resmi *LKBN Antara*, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti jurnal penelitian terdahulu, skripsi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain, teknik observasi, dokumentasi, studi pustaka. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa kesesuaian informasi dari berbagai sumber agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya (Kriyantono, 2010). Analisis data dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (penyebab masalah), *make moral judgment* (penilaian moral), dan *suggest remedies* (penyelesaian atau rekomendasi).

Adapun teknik sampling menggunakan *simple random sampling* guna menentukan berita berdasarkan sampel acak yang dianggap paling relevan. Berdasarkan penelusuran pada portal resmi *LKBN Antara* per 25 November 2025 dengan kata kunci “MBG”, ditemukan sebanyak 548 berita yang membahas topik tersebut. Dari jumlah tersebut, diambil sampel sebesar 10 persen dengan pertimbangan bahwa populasi berita bersifat homogen, sehingga diperoleh 55 berita yang selanjutnya dianalisis

menggunakan model framing Robert N. Entman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Berita

Pemberitaan mengenai program MBG dalam kurun waktu 20 Mei 2024 hingga 25 November 2025 terdapat 548 berita yang dipublikasi pada portal berita *LKBN Antara*. Terdapat 55 sampel berita yang diambil oleh peneliti pada *LKBN Antara*. Secara yuridis *LKBN Antara* merupakan perusahaan milik negara yang modal dasarnya berasal dari APBN. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tercantum dalam pasal 4 ayat (2) – (3) (UU RI NO 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, 2003). Melalui pengamatan terhadap 55 sampel berita mengenai program MBG yang meliputi judul, isi berita, dan pemilihan narasumber, *LKBN Antara* menunjukkan pola sebagai lembaga penyiaran publik yang didominasi oleh sudut pandang pemerintah. Dari analisis terhadap 55 berita, kategori judul menunjukkan bahwa 50 berita didominasi oleh sudut pandang pemerintah, sementara pada kategori isi berita dan sudut pandang narasumber terdapat 55 berita yang memperlihatkan kecenderungan yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa *LKBN Antara* masih menampilkan pola pemberitaan yang condong pada perspektif pemerintah.

Daftar berita yang diidentifikasi melalui judul, isi, dan narasumber

Jumlah Berita	Keterangan
7 berita	Narasumber dari kalangan eksekutif dan legislative
18 berita	Penggunaan kata “BGN” dan “Kepala BGN”
10 berita	Mengenai kinerja positif pemerintahan

6 berita	Berita mengatasmakan presiden dan wakil presiden
21 berita	Narasumber utama dari lembaga pemerintah (Menteri, BGN, BPS, DPR, Wamendag, Kapolri, dan pemerintah daerah.
7 berita	Pemberian judul focus pada kesan positif terhadap kinerja pemerintah
9 berita	Berita mengenai kercunan siswa

Tabel 1 Daftar berita yang diidentifikasi melalui judul, isi, dan narasumber

LKBN Antara sebagai kantor berita negara memiliki kecenderungan untuk menonjolkan sisi pemerintah baik dalam pemilihan judul, pemilihan narasumber, maupun isi berita. Keterkaitan institusional dan pendanaan dari negara menjadikan independensi media berita sering kali dipertanyakan. Hal tersebut seringkali berdampak pada praktik jurnalisme yang cenderung menjadi "corong pemerintah". Kecenderungan tersebut tercermin dalam struktur pemberitaan, yang memperlihatkan dominasi lintas sektor melalui sudut pandang dari unsur eksekutif dan legislatif seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BGN Dadan Hindayana, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Presiden Prabowo Subianto. Dari berbagai narasumber tersebut, analisis pemberitaan *LKBN Antara* terdapat 7 berita yang memuat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa, 17 berita yang memuat Kepala BGN Dadan Hindayana, 3 berita yang memuat Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, 6 berita yang memuat Menko Pangan Zulkifli Hasan, 7 berita yang memuat Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka, 21 berita yang memuat Presiden Prabowo Subianto. Minimnya representasi dari kalangan akademisi independen, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat penerima manfaat sebagai narasumber mengakibatkan narasi yang terbentuk bersifat satu arah.

Berdasarkan hasil penelitian dari 55 berita terdapat 18 pemberitaan mengenai program MBG yang awal judul berita menggunakan kata "BGN" dan "Kepala BGN". Sebagai contoh "BGN: 48 persen dari total keracunan pangan disebabkan oleh MBG (publikasi 12/11/2025 15:33 WIB)", "BGN: Verifikasi berlapis 14.403 SPPG yang siap beroperasi (publikasi 7/11/2025 13:40 WIB)", "Kepala BGN: Realisasi APBN untuk MBG per 11 Agustus capai Rp8,2 T (publikasi 12/08/2025 20:47 WIB)", "Kepala BGN sebut MBG telah jangkau 733 ribu penerima manfaat (publikasi 7/02/2025 14:45 WIB)", dll. Dari beberapa contoh diatas yang mencakup pemberitaan mengenai MBG dengan rata-rata kata pertama dalam judul memuat kata "BGN" dan "Kepala BGN". Hal tersebut menunjukkan adanya pembingkai (framing) yang menempatkan lembaga pemerintah sebagai sumber utama sekaligus aktor sentral dalam narasi pemberitaan. Dalam hal ini, penggunaan kata "BGN" dan "Kepala BGN" dapat dihilangkan dalam hal ini tidak akan mengubah arti dan tujuan judul dibuat pada berita. Pada konteks tersebut, fokus judul tidak lagi bertumpu pada aktor tertentu, melainkan pada substansi informasi yang disampaikan.

Terdapat pula diksi dalam judul-judul berita *LKBN Antara* menunjukkan upaya langsung untuk membangun opini publik yang positif terhadap kinerja pemerintah. Pemilihan kata "anggarkan", "anggaran" dan

“targetkan” dengan disertai angka-angka besar seperti Rp71 triliun dan 82,9 juta jiwa berfungsi sebagai strategi framing untuk menonjolkan kekuatan negara dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Ditemukan 10 berita yang termuat kata beberapa diantaranya, “Menkeu anggarkan Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis di RAPBN 2025 (publikasi 24/06/2024 11:17 WIB)”, “Anggaran MBG terserap Rp4,4 triliun per 12 Juni 2025 (publikasi 17/06/2025 15:53 WIB)”, “Menkeu tegaskan pangkas anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober (publikasi 7/10/2025 12:28 WIB)”, dll. Penggunaan diksi tersebut bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan upaya simbolik untuk membangun citra pemerintah terhadap masyarakat. Melalui struktur narasi yang dibangun, *LKBN Antara* tidak hanya melaporkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memperkuat agenda komunikasi pemerintah melalui pilihan bahasa dan fokus pemberitaan. Akibatnya, perhatian publik lebih diarahkan pada capaian dan komitmen pemerintah daripada pada kritik terhadap besarnya anggaran dan efektivitas program. Fenomena ini menunjukkan bahwa media tidak sepenuhnya netral, melainkan secara aktif mengonstruksi realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan pemaknaan isu. Karena itu, peristiwa yang sama dapat disajikan secara berbeda oleh setiap media, tergantung pada sudut pandang, pilihan narasumber, dan aspek yang ditonjolkan, sehingga berita yang diterima publik pada dasarnya merupakan hasil konstruksi media (Eriyanto, 2002).

Pada pemberitaan *LKBN Antara* penonjolan sosok pemimpin sangat dominan terlihat dari frekuensi

kemunculan figur-figur seperti presiden dan wakil presiden yang dijadikan sumber utama maupun pusat narasi pemberitaan. Kedua sosok tersebut presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, namanya sangat lekat di benak masyarakat sejak Pemilu tahun 2024 lalu. Pola ini menunjukkan adanya arti mendalam pada berita, di mana keberhasilan program pemerintah dikaitkan langsung dengan figur pemimpin tertentu, bukan dengan sistem kebijakan atau lembaga pelaksana. Ditemukan 6 berita yang mengatasmakan presiden dan wakil presiden sebagai subjek utama pemberitaan beberapa diantaranya “Gibran pantau uji coba makan gratis di Kota Tangerang (publikasi 5/08/2024 12:38 WIB)”, “Prabowo sebut penerima MBG capai 23 juta orang per 28 Agustus 2025 (publikasi 29/08/2025 00:01 WIB)”, “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG jangkau 36 juta sasaran (publikasi 21/10/2025 12:15 WIB)”, dll. Penempatan nama mereka di awal judul berfungsi menarik perhatian publik sekaligus membangun asosiasi langsung antara program MBG dengan pemimpin nasional. Dalam konteks teori framing Robert N. Entman, pola ini mencerminkan elemen *make moral judgment*, di mana pemberitaan secara tersirat memberikan penilaian moral bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah efektif, peduli rakyat, dan berorientasi pada keberhasilan program sosial. Hal tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan program identik dengan figur pemimpin nasional, bukan hasil kerja lembaga pemerintahan yang menyeluruh.

Adapun pemberitaan mengenai program MBG terdapat 21 berita pada *LKBN Antara* mengangkat dari perspektif pemerintahan dilihat dari

judul, isi, dan pemilihan narasumber. *LKBN Antara* cenderung menampilkan MBG sebagai program strategis nasional yang bernilai ekonomi dan sosial positif, dengan narasumber utama dari lembaga pemerintah seperti Menteri-Menteri, Badan Pangan Nasional (Bapanas/BGN), BPS, DPR, Wamendag, Kapolri, dan pemerintah daerah. Beberapa berita diantaranya yaitu “Polri target bangun 200 SPPG hingga akhir tahun (publikasi 01/07/2025 12:42 WIB)”, “Pemprov PBD & BGN bahas temuan belatung pada MBG di Sorong (publikasi 13/08/2025 14:39 WIB)”, “Di DPR, Kepala BGN: 10.012 SPPG telah terbentuk per 1 Oktober 2025 (publikasi 01/10/2025 11:18 WIB)”, “BPS: Kenaikan harga telur tak lagi meluas, hanya 151 Kabupaten/Kota (publikasi 24/11/2025 12:07 WIB)”, dll. Dari beberapa contoh berita diatas fokus pada penyampaian kebijakan dan keberhasilan program dari sudut pandang institusi negara, tanpa banyak menghadirkan pandangan di luar lingkaran pemerintahan.

Adapun beberapa berita memberikan kesan positif pada pemberian judul dan isi pemberitaan *LKBN Antara*. Terdapat 7 berita yang memuat hal tersebut beberapa diantaranya, “Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik di 26 provinsi (publikasi 05/01/2025 20:41 WIB)”, “Hingga Juni penerima manfaat program MBG capai 5,2 juta orang (publikasi 22/06/2025 16:20 WIB)”, “MBG telah jangkau 15 juta penerima manfaat jelang 80 tahun kemerdekaan (publikasi 14/08/2025 17:36 WIB)”, “Serapan produk perikanan untuk MBG diproyeksikan terus meningkat (publikasi 25/11/2025 14:11 WIB)”, dll. Pada pemberitaan tersebut secara langsung menonjolkan keberhasilan, capaian, dan dampak

positif program terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan kata-kata seperti “program MBG siap dimulai”, “program MBG serap”, “telah jangkau”, “SPPG maksimal layani”, dan “serapan produk meningkat” memperlihatkan bagaimana media berupaya membangun citra MBG sebagai program unggulan nasional yang berhasil. Dari segi framing, *LKBN Antara* memposisikan pemerintah sebagai pelaku utama dalam keberhasilan program. Namun, isi dari berita-berita tersebut didominasi oleh laporan kegiatan dan capaian kuantitatif pemerintah, seperti jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, distribusi di berbagai provinsi, serta kerjasama antarinstansi.

Dari aspek lainnya program MBG memiliki kendala dalam implementasinya yakni terjadi keracunan pada beberapa siswa. Terdapat 9 berita yang memuat hal tersebut beberapa diantaranya “Pemprov PBD & BGN bahas temuan belatung pada MBG di Sorong (publikasi 13/08/2025 14:39 WIB)”, “Pemprov Bengkulu & BPOM periksa sampel MBG penyebab keracunan (publikasi 29/08/2025 17:39 WIB)”, “BGN laporkan 70 kasus keracunan, 5.914 penerima MBG terdampak (publikasi 26/09/2025 18:18 WIB)”, “Polresta Mataram: Bakteri E. Coli sebabkan pelajar keracunan MBG (publikasi 30/09/2025 16:39 WIB)”, dll. Dari beberapa berita tersebut masalah yang didefinisikan (*Define Problems*) yaitu keracunan yang terjadi pada beberapa siswa terhadap insiden keamanan pangan. Penyebab masalah (*Diagnose Causes*) yang terjadi yakni adanya temuan belatung dan terdapat bakteri *Escherichia Coli* (*E. Coli*) pada menu MBG. Dalam aspek penilaian moral (*Make moral judgment*),

beberapa pihak terkait seperti menyampaikan permintaan maaf dan melakukan evaluasi program. Adapun solusi (*Suggest Remedies*) yang ditawarkan meliputi peninjauan langsung ke SPPG, pemberian kompensasi kepada orang tua dan anak-anak yang terdampak, pencabutan izin operasional dapur MBG, serta pelaksanaan investigasi oleh Polri, BIN, dan BPOM, disertai dengan penerbitan SLHS, sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Selain itu, beberapa pihak dari pemerintah turut terlibat dalam penanganan masalah tersebut seperti Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan, Pemprov Bengkulu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Polresta Mataram. Secara keseluruhan, pemberitaan mengenai kasus keracunan dalam program MBG dibingkai sebagai persoalan teknis yang dapat diatasi melalui evaluasi dan koordinasi lintas lembaga pemerintah. Penekanan lebih diarahkan pada langkah penyelesaian dan pemulihan kepercayaan publik daripada pada kritik mendasar terhadap perencanaan dan pengawasan program.

Berdasarkan analisis terhadap 55 berita, disimpulkan dalam elemen pendefinisian masalah (*define problems*), pemberitaan *LKBN Antara* memosisikan program MBG sebagai upaya pemenuhan nutrisi, pembukaan lapangan kerja, penguatan alokasi anggaran, penentuan target penerima, persiapan uji coba, serta penerapan standar keamanan pangan. Program lebih dibingkai sebagai solusi strategis pemerintah, sehingga persoalan dipandang sebagai aspek pelaksanaan yang perlu dioptimalkan, bukan sebagai kelemahan kebijakan. Pada elemen penyebab masalah (*diagnose*

causes), berbagai tantangan seperti pemerataan uji coba, pembangunan SPPG, besarnya alokasi anggaran, distribusi hingga daerah 3T, uji keamanan pangan, dan kenaikan harga bahan pokok diposisikan sebagai konsekuensi teknis dan struktural dari program berskala nasional, bukan sebagai indikasi kekurangan dalam perencanaan atau tata kelola.

Dalam elemen penilaian moral (*make moral judgement*), pemerintah ditampilkan sebagai aktor yang peduli, responsif, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga MBG digambarkan sebagai kebijakan positif dan berpihak pada kelompok rentan. Kritik dari perspektif independen relatif minim, yang membuat ruang evaluasi terhadap efektivitas program kurang menonjol. Sementara itu, pada elemen saran penyelesaian (*suggest remedies*), solusi yang ditawarkan didominasi langkah lanjutan pemerintah, seperti perluasan program, peningkatan anggaran, penguatan koordinasi, sertifikasi, dan optimalisasi pembangunan SPPG. Hal ini mempertegas pola framing yang bersifat top-down dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dan penentu arah penyelesaian masalah.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis framing yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *LKBN Antara* cenderung menonjolkan sudut pandang pemerintah dibandingkan menghadirkan kritik yang mendalam terhadap kebijakan yang diberitakan. Pola pemberitaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan sejarah panjang relasi antara pers dan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan sejarah berdirinya *LKBN Antara* yang sejak

awal diposisikan sebagai kantor berita nasional yang bersifat “semi-pemerintahan” melalui Dekrit Presiden tahun 1962. Secara formal *LKBN Antara* beroperasi secara otonom, namun dalam praktiknya tetap berada di bawah pengaruh kuat pemerintah, terutama dalam menentukan arah pemberitaan. Kondisi ini semakin menguat pada masa Orde Baru pasca peristiwa 1 Oktober 1965, ketika banyak media ditutup, ratusan pekerja pers ditangkap, dan jurnalis yang dituduh terkait dengan PKI dipenjarakan atau disingkirkan. *LKBN Antara* sendiri ditempatkan di bawah komando militer daerah dan sekitar 30 persen staf redaksinya dipenjarakan. Rangkaian kekerasan dan represi terhadap insan pers pada periode 1965–1966 menimbulkan trauma kolektif serta memperkuat kontrol negara terhadap media melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pokok Pers 1966 (T. Hill, 2011).

Memasuki dekade 1970-an, hubungan pemerintah dan pers kembali memanas, terutama saat pembredelan massal tahun 1974 dan 1978. Ketegangan memuncak dalam peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) Januari 1974, ketika sejumlah media yang kritis terhadap kondisi politik dan ekonomi justru dicabut izin terbitnya, seperti *Harian Kami* dan *Duta Masyarakat*, dengan alasan pelanggaran aturan. Peristiwa ini menunjukkan penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kritik serta membuat pers dan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih berhati-hati dan menghindari konfrontasi terbuka dengan pemerintah (T. Hill, 2011).

Pembredelan terjadi sejak masa kolonial Belanda, kontrol terhadap media telah diberlakukan melalui regulasi *Persbreidel Ordonnantie*

tahun 1931 yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kolonial untuk membatasi dan melarang penerbitan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Regulasi tersebut menjadi fondasi awal praktik pembredelan dan pengawasan pers di Indonesia, yang pada dasarnya menempatkan media sebagai entitas yang harus dikendalikan demi stabilitas politik (Surjomihardjo, 2004).

Memasuki masa kemerdekaan, dinamika hubungan pers dan negara tidak sepenuhnya berubah. Dalam berbagai periode politik, terutama ketika negara berada dalam situasi yang disebut sebagai “darurat” seperti saat pemberlakuan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) tahun 1957. Dalam konteks tersebut ketidakstabilan nasional dan kebebasan pers kembali mengalami pembatasan. Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga “Masa Peralihan” yang ditandai keberadaan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) (Surjomihardjo, 2004).

Memasuki era baru, pencabutan *Persbreidel Ordonnantie*, pemerintah mengesahkan UU Pokok Pers pada 12 Desember 1966. Undang-undang ini secara normatif menegaskan penghapusan sensor dan pembredelan serta menyatakan tidak diperlukannya Surat Izin Terbit (SIT). Secara prinsip pemerintah menyatakan pembredelan dan kewajiban izin bertentangan dengan dasar negara, namun dalam praktiknya mekanisme perizinan dan kontrol administratif tetap digunakan untuk mengawasi pers. Hal ini terlihat dari pembredelan sejumlah media pada Januari 1974, seperti *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Kami*, *Jakarta Times*, *Abadi*, *Mahasiswa Indonesia*, dan *Ekspres*, yang menunjukkan bahwa jaminan kebebasan pers dalam undang-undang tidak sepenuhnya diterapkan.

Dampaknya tidak hanya bersifat politis, tetapi juga psikologis dan ekonomis: wartawan menjadi ragu menentukan batas pemberitaan, narasumber enggan berbicara, kualitas berita menurun, dan sebagian informasi penting tidak terpublikasi. Akibatnya tiras media merosot dan kepercayaan publik melemah, seperti yang dialami *Indonesia Raya* yang dibredel berulang kali hingga izin terbitnya dicabut permanen pada 1974 (Surjomihardjo, 2004).

Pada dekade 1990-an, pers Indonesia sempat menikmati ruang kebebasan yang relatif lebih luas seiring pertumbuhan industri media dan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah. Namun, situasi tersebut kembali berubah pada tahun 1994 ketika Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin terbit tiga media besar, yakni *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*. Pembredelan umumnya menimpa media yang dinilai terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakjelasan standar penilaian ini mendorong banyak media bersikap lebih hati-hati dalam pemberitaan. Kondisi tersebut juga memengaruhi media yang didanai negara, termasuk *LKBN Antara*, yang secara struktural bergantung pada anggaran pemerintah dan kerap diposisikan sebagai saluran utama penyampaian kebijakan serta kepentingan negara (T. Hill, 2011).

Rangkaian pengalaman historis tersebut secara tidak langsung membentuk budaya kehati-hatian dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Media menjadi lebih selektif dalam memilih isu, lebih berhati-hati dalam menentukan sudut pandang, dan cenderung menghindari narasi yang berpotensi memicu ketegangan dengan pemerintah. Dalam konteks ini, *LKBN Antara* memiliki posisi yang lebih kompleks dibandingkan media swasta.

Sebagai lembaga kantor berita nasional yang pendanaannya bersumber dari anggaran negara, *LKBN Antara* berada dalam relasi struktural yang dekat dengan pemerintah. Walaupun secara formal memiliki otonomi redaksional, ketergantungan pada pendanaan publik dan statusnya berpotensi memengaruhi independensi pemberitaannya.

Kedekatan struktural tersebut tercermin dalam pola framing yang lebih sering menekankan pada aspek positif kebijakan pemerintah, seperti capaian program, komitmen pejabat, serta langkah-langkah solusi yang diambil, dibandingkan dengan eksplorasi mendalam terhadap potensi kelemahan, kritik publik, atau dampak negatif kebijakan. Dalam perspektif teori framing, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang publik melalui seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, serta pemilihan sudut pandang dan narasumber. Framing bekerja dengan cara menentukan bagian mana dari suatu peristiwa yang dianggap penting, bagaimana peristiwa itu dijelaskan, siapa yang diberi ruang berbicara, dan solusi apa yang ditekankan (Eriyanto, 2002). Ketika pemberitaan lebih banyak menampilkan pernyataan dan solusi dari pemerintah, sementara kritik kurang ditonjolkan, publik cenderung memahami peristiwa sesuai dengan kerangka yang selaras dengan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, framing berperan sebagai mekanisme yang memengaruhi cara khalayak menafsirkan suatu kebijakan.

Kondisi tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori agenda setting, yang menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui intensitas dan penempatan pemberitaan. Media massa

akan membentuk agenda di masyarakat melalui dua cara yakni ketika *LKBN Antara* secara konsisten memprioritaskan sudut pandang pemerintah dan menempatkannya sebagai fokus utama pemberitaan, maka isu-isu yang berkaitan dengan legitimasi dan keberhasilan kebijakan negara akan lebih menonjol dalam kesadaran publik. Melalui hal tersebut agenda setting bekerja, media menentukan topik yang layak mendapat perhatian, menjadikan agenda media, yang kemudian memengaruhi agenda publik (Littlejohn & Foss, 2011). Selanjutnya, jika kritik, kontroversi, atau dampak negatif tidak mendapatkan porsi yang seimbang atau dikaburkan, maka isu tersebut cenderung dipersepsikan sebagai kurang penting. Dari aspek tersebut, isu yang ditonjolkan oleh media akhirnya menjadi agenda publik yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat masyarakat maupun dalam ranah kebijakan politik (*policy agenda*) (Littlejohn & Foss, 2011).

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai peran dan tanggung jawab *LKBN Antara* dalam sistem demokrasi. Secara ideal, *LKBN Antara* berfungsi sebagai kantor berita negara yang melayani kepentingan masyarakat luas, menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan independen, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. *LKBN Antara* tidak seharusnya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, melainkan menjadi ruang dialog publik yang memungkinkan adanya kritik, evaluasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Namun, dalam praktiknya, relasi historis *LKBN Antara* pers dan negara, ditambah

dengan ketergantungan struktural pada pendanaan pemerintah, dapat menciptakan ketegangan *LKBN Antara* fungsi pelayanan publik dan kepentingan institusional.

Dengan demikian, kecenderungan framing pemberitaan *LKBN Antara* yang lebih selaras dengan narasi resmi pemerintah dapat dipahami sebagai produk dari dinamika historis, politik, dan struktural yang panjang. Walaupun tidak seluruh pemberitaan *LKBN Antara* cenderung mendukung narasi pemerintah, namun dalam penelitian ini seluruh pemberitaan *LKBN Antara* cenderung menjadi corong pemerintah. Dalam konteks tersebut, *LKBN Antara* lebih tampak berperan sebagai saluran komunikasi kebijakan negara daripada sebagai pengawas kritis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Padahal, *LKBN Antara* yang pembiayaan awal dibiayai oleh anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat, *LKBN Antara* memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menghadirkan informasi yang berimbang, membuka ruang evaluasi, serta memberikan tempat bagi suara alternatif di luar pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program MBG cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam konstruksi berita. Dominasi tersebut terlihat pada judul, isi, serta pemilihan narasumber yang mayoritas berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, dan aparat negara, sehingga membentuk pola pemberitaan yang bersifat top-down dan minim perspektif kritis dari masyarakat sipil maupun pihak independen.

Dalam dimensi pendefinisian masalah (*define problems*),

pemberitaan *LKBN Antara* memosisikan program MBG sebagai upaya pemenuhan nutrisi, pembukaan lapangan kerja, penguatan alokasi anggaran, penentuan target penerima, persiapan uji coba, serta penerapan standar keamanan pangan. Program lebih ditingkatkan sebagai solusi strategis pemerintah, bukan sebagai kebijakan yang perlu diuji secara kritis efektivitas dan tata kelolanya. Pada aspek penyebab masalah (*diagnose causes*), persoalan seperti pemerataan uji coba, pembangunan SPPG, besarnya alokasi anggaran, distribusi hingga daerah 3T, uji keamanan pangan, dan kenaikan harga bahan pokok diposisikan sebagai konsekuensi teknis dan struktural dari program berskala nasional, bukan sebagai indikasi kekurangan dalam perencanaan atau tata kelola. Sementara itu, pada penilaian moral (*make moral judgement*), pemerintah digambarkan sebagai pihak yang responsif, peduli, dan berkomitmen, sehingga membangun citra positif terhadap program. Adapun dalam saran penyelesaian (*suggest remedies*), solusi yang ditawarkan hampir seluruhnya berpusat pada langkah dan kebijakan lanjutan pemerintah, tanpa banyak menghadirkan alternatif dari aktor non-negara.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa framing pemberitaan *LKBN Antara* mengenai program MBG cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam struktur konstruksi berita, mulai dari pendefinisian masalah (*define problems*), penyebab masalah (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgement*), hingga saran penyelesaian (*suggest remedies*). Keterkaitan struktural dengan negara serta latar historis kontrol pemerintah terhadap pers turut membentuk

kecenderungan pemberitaan yang berhati-hati dan selaras dengan narasi resmi pemerintah. Meskipun tidak semua pemberitaan *LKBN Antara* selalu mendukung pemerintah, dalam penelitian ini seluruh berita yang dianalisis menunjukkan keselarasan tersebut. Dengan demikian, *LKBN Antara* lebih berperan sebagai saluran komunikasi kebijakan negara dibandingkan sebagai pengawas kritis. Namun, sebagai lembaga yang didanai oleh anggaran negara dari pajak publik, *LKBN Antara* memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyajikan informasi yang berimbang, membuka ruang evaluasi, serta mengakomodasi suara di luar pemerintah.

Sedangkan, saran yang pertama untuk penelitian selanjutnya supaya memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih dari satu media, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pola framing.

Yang kedua, peneliti menilai bahwa *LKBN Antara* masih memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman pemberitaan terkait program MBG dengan memperluas variasi sudut pandang dan narasumber yang digunakan. Selama ini, pemberitaan *LKBN Antara* didominasi oleh pernyataan resmi pemerintah dan lembaga negara, sehingga narasi yang dibangun bersifat satu arah dan kurang merepresentasikan pengalaman langsung masyarakat penerima manfaat maupun pandangan kritis dari pihak independen. Padahal, keterlibatan suara masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas berpotensi memperkaya informasi, meningkatkan keberimbangan berita, serta memperkuat fungsi *LKBN Antara*

yang menjalankan peran kontrol sosial secara optimal terhadap kebijakan program MBG.

DAFTAR PUSTAKA

Com, D. K., Ananda, V., Pranandana, K., Haryanti, N., & Meifilina, A. (2025). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM. *JMA*, 3(9), 3031–5220.

<https://doi.org/10.62281>

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Huda Nurul SA, Ed.; 1st ed.). LKiS Yogyakarta.

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.

Idris Muhammad. (2025, September 28). MBG “Comot” Rp 223 Triliun Jatah Pendidikan, Maksudnya Bagaimana? . Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2025/09/28/064745626/mbg-comot-rp-223-triliun-jatah-pendidikan-maksudnya-bagaimana>

Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Azmi Gustiara, Ed.; 1st ed.). Kencana Prenada Media Group.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication*. Waveland Press.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Surjomihardjo Abdurrachman. (2004). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (3rd ed.). Penerbit Buku Kompas.

Sutedjo, B. (2001). *Peranan Internet dalam Perubahan Sosial dan Sistem Komunikasi Modern di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Syakura Abdan. (2025, September 29). *Media Asing Soroti Marak Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250929163235-106-1278947/media-asing-soroti-marak-keracunan-massal-program-makan-bergizi-gratis>

T. Hill David. (2011). *Pers di Masa Orde Baru* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

UU RI NO 19 TAHUN 2003 Tentang BUMN, BPHN.go.id (2003).
<https://bphn.go.id/data/documents/03uu019.pdf>

Widyastuti Retno Pravitri, & Wulandari Nurjannah Wulandari. (2025, October 1). *Data Lengkap BGN Kasus Keracunan MBG per 30 September 2025, Pulau Jawa Tembus 4.000 Korban* . Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/nasional/7735998/data-lengkap-bgn-kasus-keracunan-mbg-per-30-september-2025-pulau-jawa-tembus-4000->

[korbanhttps://www.tribunnews.co
m/nasional/7735998/data-
lengkap-bgn-kasus-keracunan-
mbg-per-30-september-2025-
pulau-jawa-tembus-4000-korban](https://www.tribunnews.com/nasional/7735998/data-lengkap-bgn-kasus-keracunan-mbg-per-30-september-2025-pulau-jawa-tembus-4000-korban)